



## 30 Koperasi Diwarning, Baru 1 yang Berbenah

MANGUPURA, NusaBali

Dari 30 koperasi yang pencabutan badan hukumnya sudah diumumkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Badung beberapa waktu lalu, baru satu koperasi yang melakukan komunikasi dengan pemerintah, yakni kesiapan untuk berbenah.

"Baru satu yang menyampaikan kepada pemerintah bersedia aktif lagi dan akan melakukan RAT (rapat anggota tahunan). Sedangkan yang lain belum," kata Kepala Diskoperindag Badung I Ketut Karpiana, Minggu (1/11).

Sebetulnya dari 561 koperasi yang ada di Badung, 106 di antaranya dinyatakan tidak aktif. Meski begitu baru 30 koperasi yang telah diberikan surat pembubaran. Dan yang lain masih dalam tahap pembinaan. Menurut Karpiana, keputusan melakukan pembubaran untuk menghindari pencemaran ke koperasi-koperasi yang

sehat. Karena bukan tidak mungkin koperasi yang dalam pembinaan bernasib sama. "Kami menginginkan koperasi yang ada di Badung berkembang bagus, mandiri, sehat, dan berkualitas mengikuti aturan-aturan dan tidak keluar dari jati diri koperasi itu. Tapi kalau tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban, ya kami terpaksa membubarkan," tegasnya.

Bagaimana proses 'menghidupkan' kembali koperasi yang sudah tidak aktif dan anggota sudah tidak jelas? Karpiana menjelaskan pada prinsipnya masih tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, bila untuk proses pendirian baru mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi menjadi urusan pemerintah pusat.

"Yang mau aktif lagi dan melakukan RAT, tinggal

dilakukan pembinaan saja. Karena badan hukumnya kan belum dicabut. Tapi kalau sudah dicabut dan akan mendirikan lagi, baru pengesahannya melalui pemerintah pusat. Di daerah hanya memiliki kewenangan pemeriksaan dan pengawasan," jelas Karpiana.

Lalu koperasi yang tidak mengindahkan peringatan pemerintah bagaimana? Menurutnya, akan secepatnya membentuk tim untuk menentukan langkah selanjutnya. Bila dalam waktu yang ditentukan, maka akan dicabut badan hukumnya.

Puluhan koperasi yang disurati adalah koperasi yang tidak aktif dan beberapa kali tidak melaksanakan kegiatan RAT. Pengumuman pembubaran ini telah dua bulan lebih, yakni Agustus 2015 lalu, dipasang di seluruh kantor camat se-Kabupaten Badung. Batas akhir untuk berbenah adalah dua bulan setelah pengumuman. **as**

Edisi : Senin, 2 November 2015

Hal : 2



## Dewan Bangli Segera Urai 'Benang Kusut' Tunggakan PHR

BANGLI, NusaBali

Anggota DPRD Bangli, khususnya awak komisi II rupanya tidak mau berpangku tangan mengenai makin menumpuknya tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Kabupaten Bangli. Wakil masyarakat Bangli ini bakal berupaya mengurai benang kusut yang jadi biang makin besarnya tunggakan PHR yang belum terbayarkan.

Awak Komisi II DPRD Bangli, I Ketut Mastrem, member pihaknya bakal melakukan pertemuan untuk mencari masukan mengenai banyaknya pengusaha hotel dan restoran melalaikan kewajibannya.

"Kami bakal kembali mengumpulkan mereka, untuk membahas persoalan tersebut," ujar Mastrem, Minggu (1/11).

Kata polisi PDIP asal Desa Katung, Kintamani ini, sejatinya dirinya belum lama ini sempat mengadakan pertemuan dengan pelaku pariwisata di Kintamani. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari masukan untuk mengembangkan pariwisata Bangli. Selain itu, jelasnya, pertemuan juga dimaksudkan untuk mencari masukan dan solusi terkait makin tingginya tunggakan PHR di Kabupaten Bangli.

"Saat pertemuan itu, mereka juga banyak memberikan masukan pada kita. Termasuk mengenai masih banyaknya pengusaha yang nunggak PHR," ujarnya.

Lantas saat didesak pembahasan soal tunggakan PHR, jelas politisi ini, sejatinya

dalam pertemuan itu, para pemilik hotel dan restoran tidak ada niatan untuk menunggak dan menggelap pajak yang seharusnya mereka bayarkan ke pemerintah.

"Hanya saja, hal tersebut terpaksa mereka lakukan untuk mengingatkan pemerintah. Sebab, selama ini pemerintah hanya menuntut kewajiban para pelaku pariwisata, sementara hak mereka banyak terabaikan," ujarnya.

Dalam pertemuan itu mereka banyak yang mengaku belum mendapatkan haknya sebagai mana mestinya. Lanjut Mastrem, hak yang mereka maksudkan adalah kurangnya promosi wisata hingga soal belum optimalnya penataan objek wisata di Kabupaten Bangli. Mereka menuntut pemerintah meningkatkan anggaran promosi.

"Sebab, promosi selama ini dinilai minim, akibatnya kunjungan wisata di Kintamani maupun objek lainnya kurang maksimal. Disisi lain, mereka juga menuntut supaya pemerintah jangan hanya mempromosikan objek wisata yang telah dikenal, melainkan mempromosikan objek yang selama ini terpendam, namun potensial dikembangkan sebagai dinasti pariwisata di Kabupaten Bangli," sebutnya.

Kalau pemerintah mau memenuhi hak-hak itu, maka mereka pun bakal siap memenuhi kewajibannya. Pertemuan kedua bakal segera dilaksanakan. Kalau jadwal sudah siap, pihaknya juga bakal mengundang awak media. cr53

Edisi : Senin, 2 November 2015

Hal : 8



Soal Dermaga Curah Cair

## Dewan Panggil Pelindo Beberkan Perencanaan



• NUSABALI/SUDIRTA

KETUA DPRD Buleleng I Gede Supriatna bersama Wabup Buleleng Nyoman Sutjidra tinjau lokasi proyek dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang

SINGARAJA, NusaBali

DPRD Buleleng, segera agendakan pemanggilan terhadap pihak Pelindo III Surabaya cabang Pelabuhan Celukan Bawang, menyusul terungkapnya pembangunan dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang belum mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP).

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna, setelah meninjau lokasi proyek pembangunan dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang, Sabtu (31/10). "RIP itu kan belum disahkan, namun proyek sudah berjalan. Kami memandang ini masih ada per-

masalah serius dan harus kita sikapi dengan serius," katanya.

Menurut Supriatna, banyak hal yang perlu diketahui dari rencana pembangunan dermaga curah cair ini. Karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan dan data terkait proyek dermaga curah cair itu dari pihak Pelindo III dan pihak terkait.

"Setelah kami memantau, kita segera agendakan dengar pendapat bersama pihak terkait dalam proyek tersebut. Intinya, segala bentuk perizinan proyek ini harus dipenuhi baik itu yang diterbitkan pusat atau yang diterbitkan di daerah. Kami tidak ingin masalah ini menjadi polemik panjang, seh-



Sambutan - - -

ingga pemerintah bisa mengambil langkah tegas dan masalah terselesaikan dengan baik," tegas politisi PDIP asal Desa Tejakula.

Kunjungan Ketua Dewan ke lokasi proyek juga didampingi Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra, Camat Gerokgak Putu Ariadi Pribadi, dan Kapolsek

Kawasan Laut Celukan Bawang, AKP Ketut Adnyana TJ. Di lokasi sudah terlihat tumpukan besi tiang pancang pada sisi selatan lokasi proyek. Kapal tongkang bermuatan pipa berukuran besar juga tampak sandar di sekitar lokasi pembangunan dermaga.

Sementara Wabup Nyoman

Sutjidra mengingatkan agar pekerjaan proyek dihentikan sementara. Untuk itu, pihaknya berharap Pelindo III Surabaya Cabang Celukan Bawang dan pihak pelaksana proyek agar menghormati pemerintah daerah dan pekerja proyek tidak main kucing-kucingan. "Saya setuju

kalau ada pertemuan digagas dewan dan nanti akan terungkap apa yang akan dibuat di Celukan Bawang. Hormati pemerintah daerah dan tidak berusaha kucing-kucingan seperti saat kita pantau pekerjaan masih berjalan padahal legalitas proyek ini sedang dibahas," tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Buleleng meminta agar Pemerintah pusat melalui Kemenhub mengevaluasi kembali RIP Celukan Bawang. Masalahnya, RIP yang sedang dalam proses, belum mengakomodir kepentingan Perda RTRW kabupaten.

Situasi itu muncul setelah PT Pelindo III Surabaya bersiap membangun dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang. Kabarinya juga, PT Pelindo III Surabaya dalam membangun dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang tidak memperhatikan RIP Celukan Bawang.

Dari hasil koordinasi dengan Kemenhub yang diterima oleh Dirjen Perhubungan Laut dinyatakan kalau dari sisi legalitas pembangunan dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang tidak ada persoalan. Namun, dari sisi keluarnya izin tersebut belum mengacu pada RIP. Sedangkan RIP-nya sendiri masih dalam proses penyusunan dan menjadi tanggungjawab dan wewenang KSOP. **k19**

Edisi : Sabtu, 2 November 2015

Hal : 4